



**GAPAI ILMU DALAM
GENGAMAN**

MODUL PEMBELAJARAN

berbasis website

**DIGUNAKAN
UNTUK**

Siswa Kelas V SD/MI

**DIBUAT
OLEH**

Dian Armada Pradana

BAB 2



PENYEBAB PENJAJAHAN DAN USAHA UNTUK MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN INDONESIA

Latar Belakang
Masuknya bangsa Barat
ke Indonesia

*Jatuhnya Konstantinopel ke
tangan Turki*

Semangat Reconquista

Semangat penaklukan terhadap
daerah-daerah kekuasaan yang
dimiliki oleh penguasa Islam

Semangat 3G

- Gold (Kekayaan)
- Glory (Kejayaan)
- Gospel (Penyebaran agama nasrani)

Perkembangan Teknologi

- Ditemukannya kompas
- Ditemukannya astrolabe, alat untuk mengukur ketinggian matahari dan benda langit
- Adanya teori heliosentris
- Adanya teori bahwa bumi itu bulat

*Mencari dan menemukan
daerah rempah-rempah*

Bangsa Barat yang Berkuasa di Indonesia

1

Bangsa Portugis

Pada tahun 1511 dari India, bangsa Portugis mengirim ekspedisinya di bawah pimpinan Alfanso d'Albuquerque mengikuti perjalanan para pedagang Islam hingga sampai dan berhasil menguasai Malaka. Dari Malaka, bangsa Portugis melanjutkan pelayarannya ke timur hingga sampai daerah pusat rempah-rempah tahun 1512.



2

Bangsa Spanyol

Kedatangan bangsa Spanyol diawali dengan penjelajahan samudra yang dilakukan oleh Magelhaens dan Sebastian del Cano. Namun ketika tiba di Filipina, Magelhaens terbunuh. Akhirnya ekspedisi dilanjutkan Sebastian del Cano hingga sampai ke Maluku pada tahun 1521.

3

Bangsa Belanda

Penjelajahan bangsa Belanda hingga ke Nusantara pertama kali dilakukan oleh Cornelis de Houtman. Pada tahun 1556, Cornalis de Hotman tiba di Banten. Namun karena sikapnya yang kasar, ia diusir dari Banten. Kemudian pada tahun 1598, pelayaran Belanda yang ke-2 dipimpin oleh Jacob van Neck dan berhasil memperoleh rempah-rempah yang banyak.



Bangsa Inggris

Pada tahun 1577 Francis Drake memulai pulang ke Inggris setelah memborong rempah-rempah di Nusantara. Pelayaran Drake ini belum memiliki arti penting secara ekonomis dan politis. Pada tahun 1591 Sir James Lancaster dan George Raymond berhasil mengadakan pelayaran hingga sampai di Aceh dan Penang. Kemudian pada tahun 1602, Lenceter dan maskapai perdagangan Inggris (EIC) berhasil kembali tiba di Aceh dan terus menuju Banten. Di Banten, ia mendapat izin untuk mendirikan kantor dagang. Pada tahun 1604, pelayaran EIC yang dipimpin oleh Sir Henry Middleton berhasil mencapai Ternate, Tidore, Ambon, dan Belanda. Hal ini kemudian menimbulkan persaingan dengan VOC selama tahun 1611-1617. Orang Inggris juga mendirikan kantor-kantor dagang di Sukadana (Kalimantan Barat Daya, Makassar, Jayakarta, Jepara, Aceh, Panaman, dan Jambi.



Tokoh Penjelajah Samudra

Portugis

- Bartolomeu Dias (pelopor)
- Vasco da Gama
- Alfonso d' Albuquerque

Spainyol

- Christopher Colombus (pelopor)
- Ferdinand Magelhaens dan Juan Sebastial del Cano

Belanda

- Barentz
- Cornelis de Hautman
- Abel J. Tasmen

Inggris

- Sir Francis Drake
- Sir James Lancaster dan George Raymond
- Sir Henry Middleton



KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAHAN ASING DI INDONESIA

VOC

Pada tahun 20 Maret 1602, pedagang Belanda mendirikan *Verenigde Oost-Indische Compagnie* atau disebut VOC (Perkumpulan Dagang India Timur).

Pendirian VOC dilatarbelakangi adanya persaingan sengit di antara negara-negara Eropa, yaitu Portugis, Spanyol kemudian juga Inggris, Prancis dan Belanda, untuk memperebutkan hegemoni perdagangan di Asia Timur.

VOC juga mempunyai hak, atas nama Pemerintahan Belanda yang waktu itu masih berbentuk Republik untuk membuat perjanjian kenegaraan dan menyatakan perang terhadap suatu negara. Wewenang ini yang mengakibatkan, bahwa suatu perkumpulan dagang seperti VOC, dapat bertindak seperti layaknya negara.

Hak-hak istimewa tercantum dalam hak oktrooi (piagam/charta) tanggal 20 Maret 1602. Hak-hak tersebut sebagai berikut:

- Hak monopoli berdagang dan berlayar di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan dan sebelah barat Selat Magelhaens serta menguasai perdagangan untuk kepentingan sendiri.
- Hak kedaulatan (*sovereiniteit*) sehingga dapat bertindak layaknya suatu negara untuk melakukan tindakan-tindakan diantaranya; memelihara angkatan perang, memaklumkan perang dan mengadakan perdamaian, merebut dan menduduki daerah-daerah asing di luar Belanda, memerintah daerah-daerah yang diduduki, menetapkan/mengeluarkan mata uang sendiri, memungut pajak, mengadakan perjanjian-perjanjian dengan raja setempat.

VOC di Indonesia dipimpin oleh gubernur jenderal, yang pertama bernama Pieter Both yang berkedudukan di Ambon. Pada masa gubernur jenderal Jan Pieterzoon Coen, pusat pemerintahan VOC dipindahkan ke Jayakarta (Jayakarta diganti Batavia).

Tujuan pembentukan VOC:

1. Menyaingi kongsi dagang Inggris di India, yaitu EIC (*East India Company*)
2. Menguasai pelabuhan-pelabuhan penting dan kerajaan-kerajaan
3. Melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah

Di Indonesia, VOC berusaha mengisi kas keuangannya yang kosong. VOC menerapkan aturan baru, yaitu *Verplicht Leverantie* atau penyerahan wajib. Tiap daerah diwajibkan menyerahkan hasil bumi kepada VOC menurut harga yang telah ditentukan. Hasil bumi yang wajib diserahkan yaitu; lada, kayu manis, beras, ternak, nila, gula dan kapas.

VOC juga menerapkan *Prianger Stelsel*, yaitu aturan yang mewajibkan rakyat Priangan menanam kopi dan menyerahkan hasilnya kepada VOC, sehingga VOC mendapatkan keuntungan yang sangat besar.

Mulai akhir abad 18, keuangan VOC mengalami kemerosotan. Adapun hal-hal penyebab kebangkrutan disebabkan oleh:

1. Banyak korupsi yang dilakukan oleh pegawai VOC
2. Banyaknya biaya yang harus dikeluarkan VOC sebagai dampak dari peperangan yang dilakukan VOC di Nusantara
3. Persaingan yang ketat dengan kongsi dagang lain
4. Rakyat Indonesia tidak mampu lagi membeli barang-barang Belanda
5. Terjadinya perdagangan gelap

VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799.

KEBIJAKAN DAENDLES

Pada tahun 1806, Belanda di bawah kekaisaran Prancis, yaitu Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte membubarkan Republik Bataaf dan membentuk kerajaan Belanda (*Koninkrijk Holland*). Napoleon kemudian mengangkat Louis Napoleon sebagai raja Belanda. Untuk menghadapi ancaman Inggris di Nusantara, Louis Napoleon mengirim Herman Willem Daendels sebagai gubernur jendral di Nusantara. Daendels memulai tugasnya pada tahun 1808 dengan tugas utamanya yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris. Dalam menjalankan tugasnya, Daendels melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Bidang Pemerintahan

- Pusat pemerintahan dipindah ke pedalaman
- Membagi Jawa dalam 9 prefektur 31 Kabupaten
- Para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda

2. Bidang Hukum dan Peradilan

- Membuat 3 jenis pengadilan (pengadilan untuk orang Eropa, pengadilan untuk pribumi, dan pengadilan untuk orang asing)
- Memberantas korupsi

3. Bidang Militer dan Pertahanan

- Membangun jalan pos Anyer Panarukan, baik sebagai lalu lintas pertahanan maupun perekonomian
- Menambah tentara dari penduduk pribumi
- Membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang
- Membangun pangkalan angkatan laut di ujung Kulon dan Surabaya
- Meningkatkan kesejahteraan prajurit

4. Bidang Ekonomi dan Keuangan

- Mengeluarkan uang kertas
- Memperbaiki gaji pegawai
- Menerapkan pajak *Innatera* (*contingenten*) dan sistem penyerahan wajib (*verplichte leverantie*)
- Monopoli perdagangan beras
- Menjalankan *preangel stalsel*, yaitu kewajiban rakyat Priangan menanam kopi

5. Bidang Sosial

- Diberlakukan kerja rodi (dalam pengerjaan jalan pos Anyer-Panarukan)
- Berkembangnya perbudakan
- Menghapus penghormatan pada presiden dan penguasa lokal (raja dan sultan)

Pemerintahan Daendles berakhir pada tahun 1811. Penarikan Daendels kembali ke Belanda karena disebabkan oleh hal-hal berikut:

1. Bersikap otoriter sehingga menimbulkan perlawanan
2. Menjual tanah-tanah negara kepada pihak swasta
3. Buruknya sistem administrasi pemerintahan

Louis Napoleon menarik kembali Daendels karena jika tetap dibiarkan akan berakibat buruknya citra Belanda di Nusantara. Kemudian digantikan oleh Jansens sebagai gubernur jendral di Nusantara. Gubernur jendral Jansens ini lemah sehingga tidak dapat mempertahankan Jawa dari Inggris, pada tahun 1811 berhasil dikuasai Inggris.

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN INGGRIIS (1811-1816)

Sejak abad 17, pedagang Inggris sudah berdagang di daerah India. Di India Timur para pedagang Inggris mendirikan kongsi dagang yaitu *East India Company* (EIC) pada tahun 1600. Pusat kekuatan EIC adalah Kalkuta (India), dan dari kota inilah Inggris meluaskan wilayahnya ke Asia Tenggara.

Di bawah Gubernur Jendral Lord Minto yang berkedudukan di Kalkuta, dibentuk ekspedisi Inggris untuk merebut daerah-daerah kekuasaan Belanda yang ada di wilayah Indonesia. Pada tahun 1811, Thomas Stamford Raffles telah berhasil merebut seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia.

Berdasarkan kapitulasi Tuntang, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Inggris. Berikut isi kapitulasi Tuntang pada 18 September 1811.

1. Seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris
2. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris
3. Pegawai Belanda bekerja pada Inggris

Awal pemerintahan Raffles mendapat sambutan baik dari raja dan rakyat di Nusantara. Berikut tindakan Raffles selama memerintah di Nusantara (1811-1816) sebagai berikut:

1. Bidang Pemerintahan

- Pulau Jawa dibagi 16 karesidenan
- Para Bupati atau penguasa dilepaskan dari kedudukannya yang diperoleh secara turun menurun

2. Bidang Ekonomi/Keuangan

- Para petani diberi kebebasan untuk menanam tanaman ekspor
- Penghapusan pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib
- Menetapkan sistem sewa tanah

3. Bidang Hukum

- Membentuk *Court of Justice* pada setiap residen
- Membentuk *Court of Request* pada setiap divisi
- *Police of Magistrate*

4. Bidang Sosial

- Penghapusan kerja rodi
- Penghapusan perbudakan
- Peniadaan *pyinbank* (disakiti), yaitu hukuman yang sangat kejam dengan melawan harimau

5. Bidang Ilmu Pengetahuan

- Raffles menulis buku yang berjudul *History of Java* yang diterbitkan di London 1817
- Raffles mendukung *Bataviasch Genotschap* (sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan)
- Menemukan bunga *Rafflesia Arnoldi*
- Merintis Kebun Raya Bogor bersama istrinya

Berakhirnya pemerintahan Raffles di Nusantara ditandai dengan Konvensi London pada tahun 1819. Adapun isinya antara lain:

1. Nusantara dikembalikan kepada Belanda
2. Jajahan Belanda, seperti Kaap Kolani, Guyana tetap dikuasai Inggris
3. Cochin (di Pantai Malabar) diambil alih oleh Inggris, sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda sebagai gantinya

Setelah penandatanganan Konvensi London, Raffles diangkat menjadi gubernur di Bengkulu yang meliputi wilayah Bangka dan Belitung.

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA

Pemerintahan Inggris menugaskan John Fendall untuk menyerahkan Nusantara ke Belanda (Flout. Buyskess, dan Van der Capellen). Selanjutnya Van der Capellen diangkat sebagai gubernur jendral di Nusantara dan memerintah dari tahun 1816-1829.

KEBIJAKAN SISTEM TANAM PAKSA

Kegagalan pemerintahan van der Capellen menyebabkan jatuhnya kaum liberal, sehingga menyebabkan pemerintahan didominasi kaum konservatif. Sehingga pemerintah Belanda pada tahun 1830 mengangkat gubernur jendral yang baru, Johanes van den Bosch. Ia mempunyai tugas yaitu menyelamatkan keuangan pemerintahan Belanda dengan cara menarik pemasukan sebanyak mungkin dari rakyat Nusantara. Kemudian memberikan usulan dijalankannya *culturstelsel* (sistem tanam paksa).

Culturstelsel diberlakukan dengan tujuan memperoleh pendapatan sebanyak mungkin dalam waktu relatif singkat. Dengan harapan hutang-hutang Belanda yang besar dapat diatasi.

KEBIJAKAN POLITIK EKONOMI LIBERAL

Ternyata sistem tanam paksa merupakan sistem kerja paksa yang sangat tidak manusiawi sehingga menimbulkan penderitaan rakyat pribumi. Tokoh yang mengancam pelaksanaan sistem tanam paksa, antara lain Doewes Dekker, Baron van Hoevell, dan Fransen van der Putte.

Munculnya kritik-kritik tersebut mengakibatkan sistem tanam paksa resmi diberhentikan pada tahun 1870, yang ditandai dengan dikeluarkan UU Agraria tahun 1870.

Akibat dikeluarkannya UU Agraria 1870, banyak lahan Indonesia dijadikan perkebunan. Berikut aturan-aturan pemerintah Belanda dalam pelaksanaan politik ekonomi liberal:

- *Agrarische Wet* (UU Agraria 1870), berisi

1. Tanah di Indonesia dibedakan menjadi tanah rakyat dan tanah pemerintahan
2. Tanah rakyat dibedakan atas tanah milik yang bersifat bebas dan tanah desa yang bersifat tidak bebas. Tanah yang tidak bebas dapat disewakan kepada perusahaan swasta
3. Tanah rakyat tidak boleh dijual kepada orang lain
4. Tanah pemerintah dapat disewakan kepada pengusaha swasta sampai jangka waktu 75 tahun.

- *Suiker Wet*

UU gula menetapkan bahwa tanaman tebu adalah monopoli pemerintah yang secara berangsur-angsur akan dialihkan kepada pihak swasta. Pihak swasta juga diberi kesempatan yang luas untuk mendirikan pabrik gula baru. Sejak itu Hindia-Belanda menjadi negara produsen hasil perkebunan yang penting.

KEBIJAKAN POLITIK ETIS (1900-1942)

Pencetus politik etis adalah van Deventer.

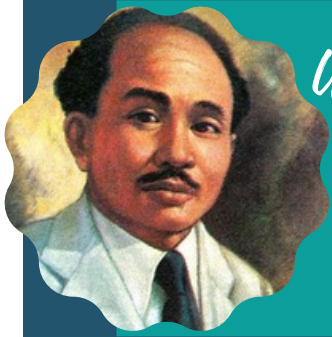
Latar belakang munculnya politik etis karena diterapkannya tanam paksa dan sistem ekonomi liberal mengakibatkan rakyat Indonesia menjadi semakin menderita dalam kemiskinan yang berkepanjangan.

Ide van Deventer terkenal dengan Trias van Deventer, yang berisi edukasi, irigasi, dan emigrasi.

Program edukasi, berupa pendirian sekolah untuk mendidik calon pegawai yang terampil.

Program irigasi, bermanfaat untuk meningkatkan pertanian, pemerintah Belanda membuat proyek-proyek irigasi.

Program emigrasi, memindahkan penduduk Jawa ke luar Jawa dengan tujuan mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa.



Usaha Mempertahankan Kedaulatan Indonesia

Pergerakan Nasional Indonesia

Gerakan bersifat kedaerahan

Ciri-ciri

- Bentuk gerakan masih bergantung pada satu pemimpin
- Bersifat kedaerahan
- Mengandalkan kekuatan senjata dan hal gaib
- Belum ada tujuan yang jelas
- Gerakannya mudah dikalahkan, berakhir pemimpin tertangkap

Gerakan bersifat nasional

Ciri-ciri

- Gerakannya sudah diorganisasi secara teratur
- Bersifat nasional baik wilayah atau cita-cita kebangsaan
- Perjuangan menggunakan taktik modern dan organisasi modern
- Sudah memiliki tujuan yang jelas, yaitu Indonesia merdeka
- Gerakannya tangguh dan berakar di hati rakyat

Perhimpunan Indonesia (PI)

- Didirikan pada tahun 1908
- Tokoh pendiri; Sutan Kasayangan dan R.N Noto Suroto
- Tujuan; memajukan kepentingan-kepentingan bersama orang-orang pribumi dan nonpribumi bukan Eropa di Belanda
- Bergerak di bidang politik

Boedi Oetomo

- Organisasi pergerakan nasional yang lahir pertama kali di Indonesia.
- Didirikan pada tanggal 20 Mei 1908
- Boedi Oetomo didirikan oleh Sutomo
- Boedi Oetomo merupakan sebuah organisasi modern karena sudah mempunyai susunan pengurus, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga.

Sarekat Islam

- Berdiri pada tahun 1912
- Diketahui oleh Haji Oemar Said Cokroaminoto
- Tujuan pendirian yaitu; mengembangkan jiwa dagang, memberikan bantuan kepada anggota-anggota yang menderita kesulitan, memajukan pengajaran dan semua yang mempercepat naiknya derajat bumiputra, menentang pendapat-pendapat yang keliru tentang agama Islam

Indische Partij (IP)

- Berdiri di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912
- Tokoh pendiri; Douwes Dekker (Danudirdja Setiabudi), dr. Cipto Mangunkusumo, Surwadi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara)
- Bersifat politik murni dengan semangat nasionalisme modern

Kongres Pemuda Indonesia

Kongres Pemuda I

- Diadakan pada tanggal 30 April - 2 Mei 1926 di Jakarta
- Diikuti oleh semua perkumpulan pemuda yang bersifat kedaerahan

Kongres Pemuda II

- Diadakan dua tahun setelah kongres pemuda Indonesia pertama, tanggal 27-28 Oktober 1928
- Dihadiri oleh wakil-wakil dari perkumpulan pemuda, antara lain Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Jong Bataksche Bond, Sekar Rukun, Pemuda Kaum Betawi, Jong Islameten Bond, Jong Java, Jong Ambon, dan Jong Celembes
- Kongres ini menghasilkan keputusan yang dikenal dengan Sumpah Pemuda

SUMPAH PEMUDA

1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia
2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia
3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia

Usaha Mempertahankan Kedaulatan Indonesia

Peristiwa Sebelum dan Sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Jepang Menyerah kepada Sekutu

Pada tanggal 9 Agustus 1945, tiga tokoh pemimpin Indonesia (Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan dr. Radjiman Wediodiningrat) berangkat ke Kota Dalat, Vietnam.

Pada tanggal 11 Agustus 1945, mereka bertemu dengan Marsekal Terauchi dan membicarakan tentang rencana kemerdekaan Indonesia. Terauchi menyampaikan bahwa pemerintah Jepang setuju untuk memberi kemerdekaan kepada Indonesia. Ir. Soekarno ditunjuk sebagai ketua panitia persiapan dan Drs. Moh. Hatta ditunjuk sebagai wakilnya.

Pada tanggal 15 Agustus 1945, ketiga tokoh tersebut kembali ke Indonesia. Pada saat yang sama, Kaisar Hirohito memerintahkan kepada semua pasukan Jepang untuk menghentikan perang dan mengakui kekalahan. Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu.

Faktor-faktor Jepang Menyerah kepada Sekutu

- Pada tanggal 6 Agustus 1945, Kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat
- Pada tanggal 9 Agustus 1945, Kota Nagasaki juga dijatuhi bom oleh Amerika Serikat

Peristiwa Rengasdengklok

- Mendengar berita kekalahan Jepang, tokoh pemuda bernama Sutan Sjahrir mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia
- Penolakan Bung Karno membuat para pemuda tidak sabar, pada tanggal 16 Agustus para pemuda membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat. Hal ini supaya segera memproklamasikan kemerdekaan sebelum ada pengaruh dari Jepang
- Pada tanggal yang sama, di Jakarta terjadi perundingan antara Mr. Ahmad Soebardjo (wakil golongan tua) dan Jusuf Kunto (wakil golongan muda) untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta. Mr. Ahmad Soebardjo diantar oleh Jusuf Kunto menuju Rengasdengklok dan kembali ke Jakarta dengan jaminan proklamasi segera dilakukan.

Perumusan Teks Proklamasi

Rombongan Bung Karno dan Bung Hatta tiba di Jakarta pada pukul 23.00 WIB. Selanjutnya mereka menuju rumah Laksamana Muda Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Laksamana Maeda adalah kepala Perwakilan Angkatan laut Jepang di Jakarta.

Perumusan naskah proklamasi disusun oleh Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo.

Setelah teks proklamasi jadi, muncul permasalahan siapa yang akan menandatangani teks tersebut. Sukarni mengusulkan ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia, seluruh hadirin menyetujui usulan itu.

Kemudian teks proklamasi di serahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Hari Jum'at 17 Agustus 1945 pukul 10.00 naskah proklamasi dibacakan oleh Bung Karno dengan didampingi oleh Bung Hatta. Peristiwa itu berlangsung di jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta (sekarang jadi jalan proklamasi).

Setelah usai dibacakan, dilanjutkan dengan pengibaran bendera Merah Putih yang dilakukan oleh Suhud Latief Hendraningrat. Pengibaran bendera Merah Putih diiringi lagu Indonesia raya ciptaan W.R. Supratman. Seluruh hadirin bersemangat menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Pelaksanaan upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai, para pemuda dan pers menyebarluaskan kemerdekaan Indonesia melalui Kantor Berita Jepang yang bernama Domei.

Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarluaskan melalui surat kabar.

Surat kabar yang pertama kali menyebarkan kemerdekaan Indonesia adalah surat kabar Soeara Asia di Surabaya.

Indonesia Setelah Proklamasi Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, PPKI mengadakan beberapa sidang yang bertujuan untuk membentuk alat kelengkapan negara.

1) Sidang PPKI Pertama

Dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Jakarta, menghasilkan:

- Mengesahkan UUD 1945 setelah mendapatkan beberapa perubahan
- Menetapkan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta
- Menetapkan bahwa presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah komite nasional

2) Sidang PPKI Kedua

Dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945, menghasilkan:

- Membentuk 12 Departemen Kementerian sekaligus menunjuk pemimpinnya (menteri)
- Menetapkan pembagian wilayah negara Republik Indonesia menjadi 8 provinsi sekaligus menunjuk gubernurnya. Provinsi tersebut meliputi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo (Kalimantan), Maluku, Sulawesi

3) Sidang PPKI Ketiga

Sidang PPKI Ketiga dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1945, membahas tentang:

Badan Penolong Keluarga Perang, menghasilkan 8 ketentuan dimana 2 pasal yang ada berisi tentang Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR)

4) Sidang PPKI Keempat

Dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945 yang menghasilkan keputusan sebagai berikut:

- Pembentukan komite nasional
- Pembentukan Partai Nasional Indonesia
- Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR)

Pada tanggal 23 Agustus 1945 Presiden Soekarno dalam pidatonya menyatakan berdirinya tiga badan baru, yaitu Komite Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Sebagai tindak lanjut dari sidang PPKI, maka dibentuk tentara nasional yang pertama yaitu Badan Keamanan Rakyat (BKR). Tujuan pembentukan tentara nasional untuk menjaga keamanan negara.

Pada tanggal 5 Oktober 1945 BKR diganti namanya menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). TKR dipimpin oleh Panglima Besar Jendral Soedirman. Selanjutnya pemerintah mengubah kembali TKR menjadi Tentara Republik Indonesia.

Pada tanggal 7 Juni 1945 Presiden Soekarno menetapkan pembentukan organisasi tentara bernama Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pada tanggal 5 Oktober ditetapkan sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia untuk mengenang pembentukan pertahanan negara tersebut.

Pada tanggal 29 Oktober 1945, komite nasional secara resmi dilantik yang berpusat di Jakarta dan di ketuai oleh Kasman Singodimeja.

Komite Nasional bertugas membantu tugas presiden selama Majelis Permusyawaratan Rakyat belum terbentuk.

Pada tanggal 2 September 1945, Ir. Soekarno berhasil membentuk kabinet RI yang pertama. Kabinet terdiri dari 12 kementerian dan 4 menteri negara. Bersama dengan pelantikan kabinet tersebut, Ir. Soekarno juga melantik para gubernur yang akan memimpin 8 provinsi.

Usaha Mempertahankan Kedaulatan Indonesia

Tokoh- tokoh yang Berperan dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Ir. Soekarno

- Ir. Soekarno adalah tokoh yang sangat berjasa di tanah air sehingga disebut sebagai Bapak Proklamator
- Pada masa perjuangan Ir. Soekarno dipanggil dengan sebutan Bung Karno
- Lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901
- Pada masa penjajahan Belanda, Bung Karno memimpin beberapa organisasi seperti PNI dan Pertindo
- Bung Karno telah beberapa kali dijebloskan ke dalam penjara oleh Belanda karena menuntut kemerdekaan Republik Indonesia
- Pada masa penjajahan Jepang, Bung Karno tetap gigih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam pembentukan BPUPKI, beliau ditunjuk menjadi anggota panitia sembilan
- Pada tanggal 1 Juni 1945 membacakan pidatonya tentang dasar negara Indonesia yang dikenal dengan istilah Pancasila

Drs. Moh. Hatta

- Lahir di Bukittinggi, 12 Agustus 1902
- Pada masa pergerakan nasional, Bung Hatta aktif dalam beberapa organisasi seperti Perhimpunan Indonesia dan PNI Baru
- Pada tahun 1926-1930 Bung Hatta menjadi Ketua PI. PI di bawah kepemimpinannya berkembang menjadi organisasi politik yang sangat berpengaruh bagi pergerakan Indonesia
- Bung Hatta merupakan salah satu dari panitia kecil yang berjumlah lima orang dalam menyusun teks proklamasi
- Merupakan wakil presiden pertama Republik Indonesia

Mr. Ahmad Soebardjo

- Lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1886
- Pada pendudukan Jepang, Mr. Ahmad Soebardjo bekerja pada kantor Biro Riset Kagun Bukamju yaitu kantor penghubung angkatan laut Jepang
- Beliau sangat berperan sebagai penghubung antara Soekarno-Hatta dengan pimpinan militer Jepang
- Menjelang kemerdekaan, karena dekat dengan golongan muda beliau berhasil meyakinkan para pemuda untuk membebaskan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta di Rengasdengklok
- Terlibat dalam penyusunan teks proklamasi
- Setelah Indonesia merdeka, beliau menjabat sebagai menteri luar negeri

Ibu fatmawati

- Merupakan istri pertama Bung Karno
- Penjahit bendera pusaka Merah putih
- Bendera pusaka dibuat pada tahun 1944, terbuat dari bahan katun



Ir. Soekarno

Drs. Moh. Hatta



A. Soebardjo

Ibu fatmawati